

JURNAL PRAXIS IDEALIS

Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan

VOL. 02 NO. 01 | 2025

DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.36859/JP.V2I1.2673](https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.2673)

P-ISSN XXXX-XXXX E-ISSN XXXX-XXXX



Received : 22 Agustus 2024 Accepted : 13 Februari 2025 Published : 14 Februari 2025

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI DATA KETENAGAKERJAAN DAN PELATIHAN TERINTEGRASI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KOTA CIMAHI

Ika Febrianti¹⁾, Yamardi²⁾, Arlan Siddha³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi Dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Cimahi.” Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi tidak berjalan efektif sehingga menghambat pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelaksanaan sidakepri, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas program dengan dimensi ketepatan program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua belas orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi belum terlaksana secara efektif. Hal ini berdasarkan analisis dari empat dimensi ukuran mengenai efektivitas program menurut Budiani dimana terdapat tiga dimensi yang belum berjalan efektif yakni sosialisasi program yang masih minim, tujuan program yang belum sepenuhnya tercapai dan tidak adanya pemantauan program secara langsung.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengangguran, Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi.

Abstract

The research title is “Effectiveness of the Implementation Integrated Employment and Training Data Information System to Overcome Unemployment in Cimahi City.” The problem that occurred in this research is the Integrated Employment and Training Data Information System was not yet effective thus hampering the government’s to reduce unemployment rate. The purpose of this research is to describe and analyze the effectiveness of the implementation of sidakepri, inhibiting factors and efforts made to overcome these obstacles. The method used in this reasearch is descriptive with a qualitative approach. The theory used is theory of program effectiveness with indicator of program accuracy, program socialization, program objectives, and program monitoring. Data collection was carried out through literature studies, observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques

through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The informants in this research numbered twelve peoples. The results of the research show that the implementation of the integrated employment and training data information system to overcome unemployment in Cimahi City has not been implemented effectively. This is based on an analysis of four dimensions of program effectiveness measurement according to Budiani, where there are three dimensions that have not been running effectively, namely minimal program socialization, program objectives that have not been fully achieved and the absence of direct program monitoring.

Keywords: Effectiveness, Unemployment, Integrated Employment and Training Data Information System

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Tidak hanya menjadi masalah nasional, pengangguran menjadi masalah krusial di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Pengangguran merupakan kondisi dimana seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan yang layak. Umumnya pengangguran disebabkan karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja menyebabkan lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada. Pengangguran berdampak pada masalah sosial politik lainnya sehingga harus diperhatikan dan menjadikan fokus utama pemerintah agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Jika penanggulangan masalah pengangguran tidak diatasi secara optimal, maka dapat mengakibatkan masyarakat tidak sejahtera dan berdampak meningkatnya kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja mengatakan bahwa: "Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia." Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk masyarakat. Pekerjaan menjadi hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Pada Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa: "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.” Berdasarkan pada undang-undang tersebut, pemerintah memiliki tugas pokok sebagai penyedia lapangan pekerjaan.

Kondisi pengangguran diperparah dengan adanya pandemi *covid-19* yang mulai muncul pada bulan Maret 2020. Adanya pandemi *covid-19* mengakibatkan setidaknya 4,15 juta masyarakat Indonesia terkena PHK sehingga kehilangan pekerjaan dan menganggur. Dampak dari pandemi *covid-19* mengakibatkan tingkat pengangguran terbuka di beberapa daerah yang ada di Indonesia meningkat. Seperti halnya di Kota Cimahi, Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka meningkat tajam hingga menduduki peringkat kedua di Jawa Barat. Pada tahun 2019 BPS Kota Cimahi merilis jumlah pengangguran terbuka mencapai 23.960 orang atau 8.09% persen. Sementara pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni menjadi 13.30% atau 39.055 orang. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pandemi *covid-19* yang menyebabkan sebagian masyarakat terkena PHK dan kehilangan pekerjaan. Tahun 2021 jumlah pengangguran terbuka di Kota Cimahi mengalami penurunan sebesar 0.23% poin sehingga menjadi 13.07% atau 38.193 orang. Hingga bulan Agustus 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 34.536 orang menganggur atau sebesar 10.77%. Jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2022 masih tergolong tinggi dibandingkan sebelum adanya pandemi *covid-19* sehingga pemerintah Kota Cimahi perlu mengatasi permasalahan tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Yanuar Taufik, menyatakan Kota Cimahi memiliki angka TPAK (Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja) yang sangat besar namun masih ada kendala dalam penyerapan tenaga kerja yang ada, padahal TPAK yang tinggi seharusnya menjadi modal atau potensi untuk menciptakan pertumbuhan yang tinggi. Permasalahan ketenagakerjaan tidak luput kaitannya dengan skill dan kompetensi pencari kerja yang belum sesuai kebutuhan pasar kerja, terbatasnya lapangan kerja, banyaknya perusahaan yang *lock out* serta kurangnya informasi pasar kerja.

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi telah melakukan upaya untuk mengurai masalah ketenagakerjaan di Kota Cimahi, di antaranya pendataan angkatan kerja, mengadakan pelatihan-pelatihan, peningkatan produktivitas, pemagangan dan penyaluran tenaga kerja. Hal ini

dilakukan untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang produktif dan berkualitas dalam hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan. Selain penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan juga kebijakan strategis untuk tetap memberikan data tenaga kerja yang akurat. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi menginisiasi aplikasi Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SIDAKEPTri) sebagai salah satu upaya untuk menekan angka pengangguran yang tinggi di Kota Cimahi. Program Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SIDAKEPTri) merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagakerjaan dalam bentuk sarana pelayanan secara online yang melibatkan lima pilar. Kelima pilar tersebut adalah pemerintah daerah, para pencari kerja, bursa kerja khursus (BKK), LPK, dan perusahaan yang membutuhkan pekerja.

Penggunaan aplikasi SIDAKEPTri yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu bentuk penerapan *e-government* dan diharapkan penerapan ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik pemerintah Kota Cimahi secara efektif dan efisien. Meski pemerintah sudah melakukan inisiasi program SIDAKEPTri tercatat tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi masih tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Hal tersebut terjadi di Kota Cimahi dimana tenaga kerja yang ada tidak terserap maksimal oleh pasar kerja yang ada.

Melihat fenomena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Cimahi yang masih tinggi yakni mencapai 10.77% atau 34.536 orang pada Agustus 2022, peneliti menemukan beberapa kelemahan pada pelaksanaan SIDAKEPTri sebagai salah satu upaya untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil observasi fenomena, peneliti temukan beberapa masalah yakni sebagai berikut: a) Aplikasi SIDAKEPTri belum diketahui seluruh lapisan masyarakat Kota Cimahi; b) Aplikasi SIDAKEPTri belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat; c) Informasi lowongan pekerjaan yang tersedia di platform SIDAKEPTri

kurang *update*; d) Pemerintah kurang memperhatikan perihal waktu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan e) Pelatihan yang diberikan kepada para pencari kerja belum merata.

Dengan adanya kekurangan dalam pelaksanaan SIDAKEPTri menjadikan program ini belum efektif dalam menekan angka pengangguran terbuka di Kota Cimahi. Dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi (SIDAKEPTri) agar efektif. Dengan melakukan pemanfaatan SIDAKEPTri yang lebih efektif maka program ini dapat digunakan baik oleh para pencari kerja dan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Cimahi. Berdasarkan temuan masalah yang peneliti dapatkan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai efektivitas dari pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi dalam mengurangi pengangguran terbuka di Kota Cimahi.

Landasan Teori

1. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas menurut Kurniawan (dalam Jurnal Saintech 2016: 58) adalah “Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada ketegangan diantara pelaksananya”. Adapun menurut Siagian (2011: 24) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya.” Mengingat banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas itu sendiri, terdapat beberapa indikator untuk mengukur efektivitas. Adapun menurut Budiani (2007) beberapa indikator untuk mengukur efektivitas, yaitu sebagai berikut:

a. Ketepatan sasaran program

Mengukur efektivitas berdasarkan ketepatan dalam memenuhi sasaran yang telah direncanakan.

b. Sosialisasi program

Kemampuan petugas program terkait dalam memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan dan tujuan program.

c. Tujuan program

Ketepatan dalam menentukan tujuan strategi dan dijadikan sebagai pedoman yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

d. Pemantauan program

Pada saat pelaksanaan program perlu diadakan pemantauan guna mengetahui tujuan program tersebut tercapai atau tidak.

2. *E-Government*

Dapat diartikan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta lain-lain yang berkenaan dengan pemerintah. *E-government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. *E-government* memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, peningkatan partisipasi warga, layanan-layanan baru dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastruktur. Melalui *e-government*, pelayanan pemerintah lebih transparan, dapat dilacak prosesnya, akuntabel, dan pelayanan lebih efektif dan efisien.

3. Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi

Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi atau SIDAKEPTri adalah program yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi untuk memudahkan para pencari kerja memperoleh informasi lowongan pekerjaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet. Aplikasi ini merupakan perwujudan dari pengelolaan dan pengembangan sistem ketenagakerjaan dalam bentuk pelayanan secara online yang melibatkan lima pilar ketenagakerjaan yakni pemerintah daerah, pencari kerja, perusahaan, lembaga pelatihan, dan Bursa Kerja Khusus (BKK). Dalam aplikasi SIDAKEPTri terdapat beberapa layanan

ketenagakerjaan yakni: 1) Lowongan Pekerjaan; 2) Informasi Pelatihan; dan 3) Pembuatan Kartu Kuning.

4. Pengangguran

Pengangguran dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya pengangguran disebabkan karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja menyebabkan lapangan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2020: 9) bahwa “Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti ialah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan (triangulasi), analisis data yaitu bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif relative menekankan makna daripada generalisasi”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena keharusan mendeskripsikan terkait bagaimana efektivitas sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi. Metode ini dianggap paling relevan sehingga nantinya peneliti dapat menggambarkan berbagai sumber data dan informasi yang digunakan sebagai data untuk mendukung penelitian ini. Peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe ini membantu mengumpulkan data aktual yang terjadi di lapangan saat penelitian sedang dilakukan sehingga data tersebut dapat dipelajari lebih mendalam.

Pada penelitian efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran

di Kota Cimahi, peneliti merupakan instrumen utama serta didukung dengan adanya pedoman wawancara yang berisi pertanyaan terbuka, foto, dokumen, serta alat dokumentasi untuk menghimpun data yang ditemukan pada saat penelitian. Menurut Creswell (2016: 248) mengenai instrument penelitian, bahwa: "peneliti sebagai instrument kunci (*researches as key instrument*), peneliti mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Informan yang dipilih sebagai *key informant* atau informan kunci adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Selain Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, peneliti juga melibatkan informan lainnya yaitu Kepala Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Staff Pengantar Kerja, masyarakat pengangguran yang aktif mencari kerja tiga orang, dan masyarakat yang menggunakan SIDAKEPTri sebanyak lima orang.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data melalui dialog secara langsung antara peneliti dengan informan. Pada penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan yang telah ditentukan terkait dengan Efektivitas Pelaksanaan Sistem Data Informasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Cimahi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dikemukakan oleh Sugiyono (2020: 131) bahwa: "Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain". Teknik pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan dan menerangkan bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sistem Data Informasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Cimahi.

Masalah pengangguran di Kota Cimahi merupakan masalah yang cukup kompleks, jika tidak diatasi dengan baik dapat menimbulkan masalah lainnya. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi dengan menggunakan teori Budiani (2007) yang terdiri dari empat indikator yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Dalam pelaksanaan program sidakepri tidak terlepas dari hambatan sehingga perlu diketahui dan dianalisi untuk kemudian diambil solusi untuk mengatasinya.

PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan Dan Pelatihan Terintegrasi Dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan empat indikator menurut Budiani (2007) sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan Sasaran Program dapat dilihat berdasarkan ketepatan penerima manfaat dan kesesuaian harapan penerima manfaat terhadap program sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi atau sidakepri. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi menunjukkan bahwa penerima manfaat program sidakepri adalah masyarakat Kota Cimahi yang sedang mencari kerja. Berdasarkan pernyataan informan terkait kesesuaian harapan penerima manfaat program sidakepri sudah sesuai, mereka terbantu dengan adanya sidakepri mobile namun perlu adanya pengembangan terkait programnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait program sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi kepada sasaran program. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi kepada masyarakat Kota Cimahi pada umumnya dan kepada para pencari kerja pada khusunya belum

maksimal. Data tersebut berdasarkan pernyataan informan mengenai sosialisasi program kepada sasaran program masih minim serta pengetahuan penerima manfaat terhadap program masih kurang.

3. Tujuan Program

Tujuan program dapat diartikan sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi bahwa tujuan dari program sidakepri adalah sebagai wadah untuk menyediakan informasi berbagai lowongan pekerjaan, informasi pelatihan, dan pembuatan kartu kerja atau AK-1 secara online. Tujuan tersebut belum tercapai dengan baik melihat di lapangan bahwa informasi yang tersedia di sidakepri tidak *update* atau sudah usang sehingga para pencari kerja sudah tidak bisa mendaftar. Selain itu, pembuatan kartu kuning melalui sidakepri masih belum maksimal karena pelayanannya cukup lama dikarenakan terkadang terhambat masalah teknis.

4. Pemantauan Program

Pemantauan program dapat dilihat berdasarkan pemantauan dari instansi terkait terhadap pelaksanaan program dan pertanggungjawaban pihak pelaksana terhadap program sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi. Pemantauan program sidakepri dilakukan dengan cara melihat dari jumlah pengguna program sidakepri dan jumlah pengajuan pembuat AK-1. Selain itu, untuk pengembangan sistem pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Selanjutnya, terkait pertanggungjawaban Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sebagai pihak pelaksana program sidakepri masih kurang, hal ini dinilai berdasarkan tujuan program yang belum tercapai, sosialisasi program yang masih minim dan pemantauan program yang belum berjalan dengan baik.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan Dan Pelatihan Terintegrasi Dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Cimahi

Pada efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi. Pada pelaksanaan sidakepri terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diketahui untuk dapat diatasi sehingga program dapat berjalan efektif. Hambatan yang terjadi dalam efektivitas pelaksanaan sidakepri dapat dilihat dari dimensi ketepatan program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, yang peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran Program

Hambatan efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi pada dimensi ketepatan program adalah data pengangguran Kota Cimahi tidak lengkap *by name by address* sehingga menghambat proses sosialisasi dan harapan para pencari kerja belum terpenuhi seutuhnya.

2. Sosialisasi Program

Hambatan pada dimensi sosialisasi program sidakepri belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Program sidakepri dapat diketahui oleh masyarakat kota Cimahi pada umumnya dan para pencari kerja pada khususnya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi karena tidak semua masyarakat berinisiatif mencari informasi sendiri dan tidak semua masyarakat melek digitalisasi. Sinergi antara pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dengan lembaga yang ada di bawahnya, baik pihak kecamatan maupun kelurahan dalam menyampaikan informasi sidakepri belum optimal dan butuh peninjauan kembali.

3. Tujuan Program

Hambatan pada dimensi tujuan program dalam efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi adalah informasi yang tersedia di platform sidakepri tidak

update atau sudah usang sehingga para pencari kerja sudah tidak bisa mendaftar. Selain itu, pembuatan kartu kuning melalui sidakepri belum maksimal karena pelayanannya cukup lama sehingga kurang efektif.

4. Pemantauan Program

Diketahui bahwa hambatan efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi pada dimensi pemantauan program adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengembangan sistem dan data pengangguran yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi tidak lengkap secara *by name by address* namun hanya data secara global.

Upaya Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi Dalam Mengatasi Hambatan Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan Dan Pelatihan Terintegrasi Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kota Cimahi

Adapun upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang terjadi pada efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi yaitu:

1. Ketepatan Sasaran Program

Upaya yang dilakukan adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan yang kemudian informasi terkait program sidakepri disampaikan hingga ke tingkat RT/RW sehingga lebih tepat sasaran.

2. Sosialisasi Program

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada dimensi sosialisasi program adalah dengan cara menggunakan media sosial sebagai media untuk bersosialisasi dan menyisipkan sosialisasi program sidakepri di berbagai kegiatan dinas seperti kegiatan *job fair*.

3. Tujuan Program

Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi akan melakukan pembaruan terhadap sidakepri untuk menjadi lebih baik, menambahkan fitur yang semakin memudahkan para pencari untuk mendapatkan pekerjaan.

Upaya ini baru direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dan belum dijalankan.

4. Pemantauan Program

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada dimensi pemantauan program adalah melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak pengembang guna memantau sistem daripada program sidakepri. Upaya yang lain terkait pemantauan program adalah dengan menjadikan data jumlah pengguna sidakepri dan jumlah pembuat kartu kuning sebagai data untuk memantau pelaksanaan program sidakepri.

KESIMPULAN

1. Hasil wawancara yang telah peneliti analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat sesuai dengan analisis dari ukuran mengenai efektivitas program menurut Budiani, yaitu ketepatan sasaran program sudah tepat yakni masyarakat Kota Cimahi yang sedang mencari kerja, sosialisasi program yang masih minim karena terhalang anggaran, tujuan program yang belum seutuhnya tercapai dan kurangnya pemantauan program secara langsung.
2. Faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi adalah data pengangguran Kota Cimahi tidak lengkap *by name by address*, sosialisasi yang dilakukan pihak pelaksana masih minim, keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengembangan sistem sidakepri.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi dalam mengatasi hambatan efektivitas pelaksanaan sistem informasi data ketenagakerjaan dan pelatihan terintegrasi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cimahi adalah berkoordinasi dengan pihak kelurahan atau kecamatan yang kemudian informasi terkait program sidakepri disampaikan hingga ke tingkat RT/RW, menggunakan media sosial sebagai media untuk bersosialisasi dan menyisipkan sosialisasi program sidakepri di berbagai kegiatan dinas seperti kegiatan *job fair*, melalukan pembaruan terhadap sidakepri untuk menjadi lebih baik, menambahkan fitur yang semakin memudahkan para pencari untuk mendapatkan pekerjaan, melakukan kerjasama dengan pihak swasta atau pihak pengembang guna memantau sistem daripada program sidakepri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Hutasoit, Imelda. (2017). Pengantar Ilmu Kependudukan. Alfabeta, Bandung.
- Indrajit, Richardus Eko. (2013). Empat Tipe Relasi E-Government. Andi, Yogyakarta.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama, Bandung.
- Starawaji. (2009). *Corporate Social Responsibility dalam praktek di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

JURNAL:

- Madjid, U., & Umar, A. U. (2023). Efektivitas Program Pelatihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja Dalam Rangka Menurunkan Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 6(2), 340-352.
- Marsella, A. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Tenaga Kerja Mandiri Dalam Mengatasi Pengangguran Di Dinas Tenaga Kerja Simalungun.
- Putra, A. A. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pada Masyarakat Di Kota Palu (Studi Tentang Kelompok Usaha Bersama). *Katalogis*, 6(8), 1-8.
- Putri, E. H. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda). *EJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5431-5445.

Rahman, D., & Rahman, K. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Studi Program Kartu Prakerja Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(1), 39-53.